

LAPORAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



DINAS PERHUBUNGAN KOTA BIMA

*Jln. Garuda No. 05 Email : dishub.kotabima@gmail.com
Raba-Bima, NTB*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bima ini berisikan penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan pembangunan sektor Perhubungan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan di daerah, isu-isu kerja pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2022 ini tidak lepas dari partisipasi dan dukungan dari semua pihak yang terkait, untuk itu perkenankanlah kami untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2022 ini. Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Besar harapan kami bahwa Dinas Perhubungan Kota Bima bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bima melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Perhubungan Kota Bima.

Kota Bima, Januari 2022
KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BIMA,

Drs. M. FARID, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640423 199003 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Daerah	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	36
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	39
BAB V PENUTUP	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

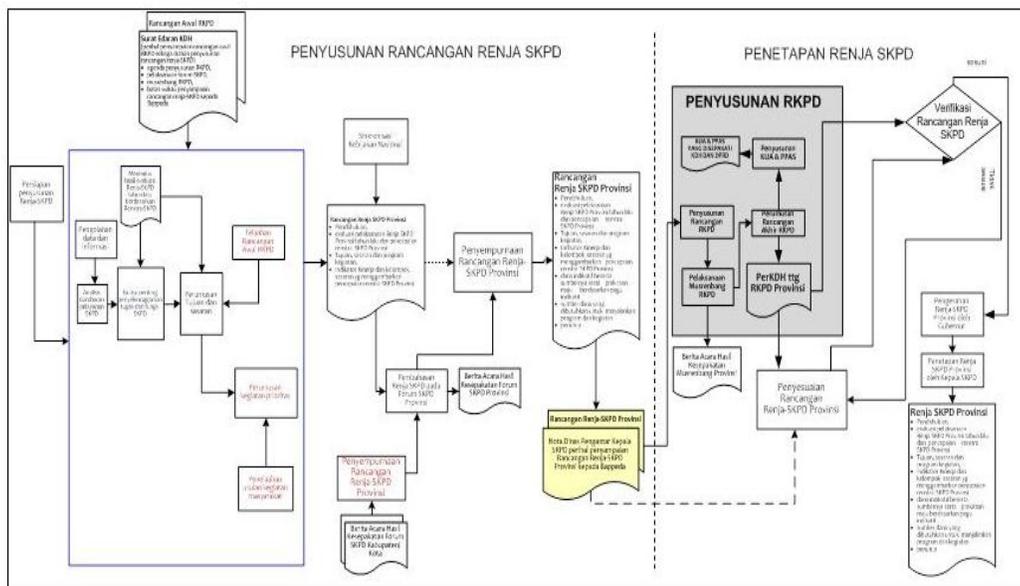
Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan semua unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada, dan hal tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengatur lingkup dan tingkatan perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu DINAS PERHUBUNGAN Kota Bima sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai pedoman atau arahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun.

RENJA DINAS PERHUBUNGAN Kota Bima Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN Kota Bima Tahun 2018-2023. RENJA ini sebagai arahan kegiatan tahunan bagi DINAS PERHUBUNGAN sebagai Perangkat Daerah juga merupakan bahan untuk kelengkapan atau penyempurnaan RKPD Tahun 2022 sebagai dokumen yang mengarahkan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Bima secara keseluruhan.

RENJA ini berisi berbagai program dan kegiatan pembangunan baik kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin (Belanja Tidak Langsung) maupun kegiatan-kegiatan pembangunan (Belanja Langsung).Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DINAS PERHUBUNGAN Kota Bima ini semuanya bermuara pada upaya peningkatan pelayanan baik pelayanan intern dalam rangka pengembangan organisasi maupun pelayanan ekstern atau kepada seluruh Perangkat Daerah dalam rangka pembinaan perencanaan dan koordinasi kebijakan Pembangunan Daerah Kota Bima.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



1.2.Landasan Hukum

Penyusunan RENJA DINAS PERHUBUNGAN Kota Bima tahun 2022 mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunan seperti sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 184).
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RENJA DINAS PERHUBUNGAN Kota Bima Tahun 2022 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan pada DINAS PERHUBUNGAN Kota Bima Tahun 2022.

Adapun Tujuan penyusunan RENJA DINAS PERHUBUNGAN Kota Bima Tahun 2022 ini adalah:

1. Mewujudkan pencapaian Sasaran Bidang Perhubungan yang mendorong pencapaian sasaran pembangunan Kota Bima
2. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Renstra Dinas Perhubungan dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Dinas Perhubungan.
3. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
4. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Perhubungan.
5. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan serta indikator kinerja Dinas Perhubungan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun-tahun mendatang.

RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bima tahun 2018-2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Prosentase penggunaan anggaran tahun 2021, dari pagu anggaran Dinas Perhubungan Kota Bima termasuk Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp. 12.010.302.504,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 11.573.762.496,00 atau sebesar 96.37%. Dari nilai realisasi tersebut terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 436.540.008,00 atau 3.77%.

Terdiri dari Pagu Belanja Operasi sebesar Rp. 10.422.722.979,- direalisasikan sebesar Rp. 10.036.661.496,00,- atau 96.30% dan pagu Belanja Modal sebesar Rp. 1.567.579.525. 00,- direalisasikan sebesar Rp. 1.537.101.000. 00 atau 98.06% yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan,jaringan dan irigasi.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2022

Kode		Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan Output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2019			Target program/kegiatan Renja PD tahun berjalan(Tahun 2021)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020		Catatan
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11	
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	85%	80%	94.11	100%	100%	100%
2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA/DPA Satuan Kerja	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan yang sesuai ketentuan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						

2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan pada perangkat daerah	1 Paket						
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD bidang sekretariat	12 Bulan						
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen						
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Semester Realisasi Anggaran	4 Dokumen						
2	15	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen						
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Realisasi Anggaran	Tersedianya pakaian dinas yang layak	70 Pasang						
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen kelistrikan perkantoran	1 Paket						
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket						
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan	Terlaksananya rapat-rapat	12	12	12	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

					Logistik Kantor	koordinasi antara bidang dan SKPD terkait serta pelayanan terhadap tamu	Bulan	Bulan	Bulan			
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	4 Dokumen					
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan pihak Propinsi NTB, Propinsi lain dan Kementerian	60 Dokumen					
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang teregister serta terbayarnya honor untuk jasa non pegawai (K2 dan tenaga kontrak)	300 Lembar					
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya pelayanan operasional kantor	12 Bulan					
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honor untuk jasa non pegawai	12 Bulan					
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional (mobi dan motor) serta terbayarnya honor untuk jasa non pegawai	14 Unit					
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Terbayarnya STNK dan Pajak Kendaraan Dinas (Mobil dan Motor)	14 Kendaraan					

					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perbaikan AC, PC, dan Laptop	1 Paket					
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung dan pagar kantor	1 Paket					
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		136	100	110	136	136	136
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Peningkatan disiplin lalu lintas dan angkutan jalan, peran forum LLAJ dan rekayasa LLAJ serta terbayarnya honor untuk jasa non pegawai	12 Bulan					
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang telah memiliki perlengkapan jalan	40 km					
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Panjang jalan yang telah terpelihara perlengkapan jalannya	40 km					
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terbayarnya honor untuk jasa non pegawai	1 Unit					

2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Luas Pagar yang diperbaiki di Terminal Jatibaru	60 m2						
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Pengawasan Izin Parkir Khusus Koordinasi dan Pengawasan Izin Parkir Tepi Jalan Umum	4 titik 47 titik						
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya SDM yang handal untuk pengujian berkala kendaraan bermotor	2 Orang						
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang Lulus dalam Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3000 Unit						
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengetahuan Pemilik Kendaraan Mengenai Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor	100 Orang						
2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terbayarnya honor untuk jasa non pegawai	12 Bulan						
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan disiplin lalu lintas dan angkutan jalan	1 Kegiatan						

2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Peningkatan disiplin lalu lintas dan angkutan jalan	12 Bulan					
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN									
2	15	03	2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal								
2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya pelabuhan pengumpan local	1 Unit					
2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terwujudnya pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal serta terbayarnya honor untuk jasa non pegawai	1 Unit					

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota antara lain kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota masih belum optimal.

Keberhasilan pembangunan secara umum sangat ditentukan oleh peran sektor perhubungan, karenanya sektor ini harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa. Dinas Perhubungan sebagai pengambil kebijakan untuk sektor Perhubungan juga akan merasakan dampak positif apabila sektor tersebut dapat melayani masyarakat dengan maksimal.

Untuk mencapai pelayanan yang maksimal, pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara. Dalam mengukur hasil pelayanan yang digunakan indikator kinerja kunci yang sudah ditentukan dalam SPM maupun indikator kunci yang ditetapkan secara mandiri oleh Perangkat Daerah.

Hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan, pelaksanaan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Bima telah mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam tabel dibawah ini ditampilkan beberapa target dan pencapaian indikator kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2021.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bima

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/ Nilai target/ standart(IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	-	-	-	BAIK	BAIK	BAIK	-	-	-	BAIK	
2	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	-	80%	85%	90%	95%	100%	-	85%	85%	90%	
3	Persentase pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	-	80%	85%	90%	95%	100%	-	85%	85%	90%	
4	Angka kecelakaan darat	-	10	8	7	6	5	-	8	8	7	
5	Cakupan pelayanan angkutan umum yang layak	-	80%	85%	90%	90%	95%	-	85%	85%	90%	

2.3. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dinas Perhubungan Kota Bima dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima. Kedudukan Dinas Perhubungan Kota Bima yang merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bima.

Dinas Perhubungan Kota Bima, berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bima. Adapun rincian jabatan dan tugas pokok serta fungsi Dinas Perhubungan Kota Bima, dijabarkan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebaigian urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas meliputi bidang perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan Penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Perhubungan sesuai dengan visi dan misi;
2. Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan untuk mendukung visi dan misi Kota Bima serta kebijakan;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang perhubungan;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam pemberian perizinan bidang perhubungan;
6. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan pihak terkait di bidang perhubungan;
7. Pembinaan kepegawaian serta pengelolaan sarana dan prasarana yang menjadi aset dinas perhubungan;
8. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas;
9. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
10. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
11. Penyelenggaraan administrasi di bidang perhubungan;

12. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dan;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai bidang tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program penyusunan laporan dan evaluasi;
2. Pengelolaan urusan keuangan;
3. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan badan;
4. Pengelolaan urusan ASN; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
3. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai ;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan ;
5. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara ;
6. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai ;
7. Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan keuangan ;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan keuangan dibidang perhubungan;
4. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang perhubungan ;
5. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran ;
6. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang perhubungan ;
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan ;
8. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan ;
9. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji, perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar ; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perhubungan

Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan, dokumentasi, informasi dan publikasi di bidang perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penyusunan rencana umum jaringan transportasi dan kebijakan teknis di bidang perhubungan ;
2. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas seksi pengendalian lalu lintas angkutan jalan, seksi perhubungan laut dan seksi rekayasa lalu lintas ;
4. Pelaksanaan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas transportasi daerah ;
5. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi ;

6. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya Kota Bima ;
7. Penyusunan perumusan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kota Bima;
8. Pemrosesan rekomendasi izin Angkutan kota Dalam Provinsi (AKDP);
9. Pemrosesan rekomendasi izin usaha angkutan umum baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek ;
10. Penyusunan dan perumusan jaringan jalan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kota Bima ;
11. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Kota Bima ;
12. Pemrosesan rekomendasi operasi angkutan sewa izin usaha angkutan pariwisata dan izin usaha angkutan barang ;
13. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan umum dalam daerah;
14. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan daerah ;
15. Pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data statistik terkait tugas bidang perhubungan dalam daerah ;
16. Pemrosesan rekomendasi izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
17. Penyusunan dan merumuskan rencana kebijakan dan kebijakan operasional pengamanan dan pengawasan lalu lintas;
18. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ketertiban lalu lintas ;
19. Pelaksanaan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi bidang perhubungan;
20. Pelaksanaan laporan secara berkala kepada atasan dan;
21. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perhubungan membawahi :

a) *Seksi Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Seksi pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pembinaan teknis operasi pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai

fungsi :

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan lingkup tugasnya;
2. Penyusunan rencana kerja seksi pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan ;
3. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan visi misi bidang ;
4. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran kegiatan pada lingkup tugasnya ;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait berdasarkan ketentuan serta keterkaitan fungsi, sebagai penunjang pelaksanaan tugas ;
6. Koordinasi, sinkronisasi dalam operasi dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas ;
7. Penyusunan rencana dan penetapan jadwal kegiatan operasi dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Kota Bima ;
8. Penyusunan dan penetapan tarif angkutan kota untuk angkutan umum kelas ekonomi di jalan Kota Bima ;
9. Pelaksanaan penertiban kelebihan muatan angkutan orang dan angkutan barang ;
10. Penyusunan dan penetapan batas maksimum muatan barang dan berat kendaraan yang akan lewat pada jalur jalan yang ditetapkan ;
11. Penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan penertiban kendaraan bongkar muat barang ;
12. Pembinaan pengembangan karir dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier bagi staf / bawahan yang berprestasi dan berpotensi ;
13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kota Bima ;
14. Perencanaan studi kajian analisis dampak lalu lintas (Amdalalin) di Kota Bima ;
15. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan ;
16. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya ;
17. Pelaksanaan penyelidikan pelanggaran, kelebihan muatan barang di jembatan timbang dan terminal dan ;
18. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) *Seksi Pelayaran*

Seksi pelayaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan jasa pelayaran dan pengelolaan pelabuhan serta penunjang dan fasilitas pelabuhan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pelayaran mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja di bidang pelayaran ;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis di bidang pelayaran ;
3. Pelaksanaan anggarankegiatan ;
4. Pelaksanaan koordinasi tugas dengan seksi terkait ;
5. Pelaksanaan pengawasan atau pemantauan atas pengoperasian kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT7 (GT<7) yang berlayar dilaut;
6. Penyusunan dan perumusan rencana kebijakan dan kebijakan operasional dalam bidang pelayaran ;
7. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan rakyat ;
8. Penetapan besaran tariff jasa kepelabuhan lokal yang di selenggarakan pemerintahan daerah;
9. Penyusunan dan penetapan tarif angkutan kota untuk angkutan umum kelas ekonomi di jalan Kota Bima ;
10. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah ;
11. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur bag : perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas wilayah pelabuhan kota dan;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) *Seksi Rekayasa Lalu Lintas*

Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan rekayasa lalu lintas yaitu manajemen dan perlengkapan jalan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja dibidang rekayasa lalu lintas;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis di bidang rekayasa lalu lintas;
3. Pelaksanaan anggaran kegiatan;
4. Pelaksanaan koordinasi tugas dengan seksi terkait ;
5. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi kegiatan, data dan penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan rekayasa lalu lintas ;
6. Penyusunan dan perumusan rencana kebijakan dan kebijakan operasional pengaturan, perekayasaaan pemberdayaan dan pengawasan lalu lintas;
7. Pelaksanaan indentifikasi masalah lalu lintas ;
8. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum ;
9. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C ;
10. Pengesahan rancangan bangunan terminal tipe C ;
11. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota ;
12. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota ;
13. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ;
14. Pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan ;
15. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota ;
16. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kota dan ;
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan

Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan program pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan, dokumentasi, informasi dan publikasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis rencana umum sarana dan prasarana perhubungan Kota Bima;

2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
4. Pelaksanaan laporan secara berkala kepada atasan;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya ;

Bidang sarana dan prasarana perhubungan membawahi :

a) *Seksi Pengelolaan Terminal*

Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis serta kebijakan operasional manajemen pengelolaan terminal Kota Bima.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan penyiapan, perumusan kebijakan, penyusunan pedoman kerja/ SOP pengelolaan terminal;
2. Pelaksanaan pemantauan dan bimbingan teknis operasional pengaturan lalu lintas kendaraan pada petugas terminal;
3. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dalam terminal;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring atas pelayanan penumpang oleh para sopir dan pengusaha angkutan;
5. Penyiapan data dan statistik, informasi/pengumuman kedatangan dan keberangkatan bus dan angkutan penumpang dalam terminal kota;
6. Pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
7. Penyiapan data statistik terminal barang dan data mengenai pemilik, pengemudi angkutan penumpang, angkutan barang dalam wilayah terminal barang kota;
8. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan anggaran kegiatan seksi dan;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) *Seksi Perpakiran*

Seksi Perpakiran mempunyai tugas merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis serta kebijakan operasional manajemen parkir Kota Bima.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Perpakiran mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan penyiapan, perumusan kebijakan, penyusunan pedoman kerja / SOP pengelolaan parkir;
2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring atas pelayanan parkir oleh juru parkir pada titik-titik parkir di wilayah kota;
4. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
5. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
6. Pelaksanaan anggaran kegiatan seksi dan;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) *Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas*

Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis serta kebijakan operasional sarana dan prasarana lalu lintas Kota Bima.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan petunjuk teknis serta rencana strategis dibidang sarana dan prasarana lalu lintas;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis dibidang sarana dan prasarana lalu lintas;
3. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sarana dan prasarana lalu lintas;
4. Pelaksanaan laporan secara berkala kepada atasan dan;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

a. *Unit Pelaksanaan Teknis*

UPT adalah Unit Pelaksanaan Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan tugas Fungsional dengan keahlian seperti : menilai kelayakan kendaraan yang akan diterbitkan surat kelayakan operasinya.

Jabatan fungsional ini pada OPD Dinas Perhubungan terdapat pada Balai Pengujian Kendaraan bermotor.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2022, program dan kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai dengan Rancangan awal RKPD Kota Bima Tahun 2022, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan masing-masing OPD.

Tabel 2.4

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Bima

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kota Bima

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 00)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bima	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4.297.673.851	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	100%	4.426.604.067	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.784.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.838.138	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA/DPA Satuan Kerja DPA Satuan Kerja		286.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				295.404	

Koordinasidan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/ DPA Satuan Kerja	249.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	256.470
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	249.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	256.470
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan yang sesuai ketentuan	999.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.029.794
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.193.517.801	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaa n Kegiatan Administra si Keuangan Perangkat Daerah 3.289.323.335
Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Kota Bima,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gaji dan TunjanganASN yang dibayarkan padaperangkat daerah	3.025.218.001	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	3.115.974.541
Pelaksanaan	Kota Bima,	Pelaksanaan		Pelaksanaan	

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD bidang sekretariat	164.978.000	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	169.927.340
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	199.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	205.794
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Laporan Keuangan Semester Realisasi Anggaran	2.873.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.959.190
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	249.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	256.470
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			400.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	412.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Realisasi Anggaran	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pakaian dinas yang layak	400.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Realisasi Anggaran	412.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah			234.378.650	Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.410.010
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen kelistrikan perkantoran	3.992.650	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.112.430

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3.794.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.908.335
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi antara bidang dan SKPD terkait serta pelayanan terhadap tamu	53.528.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.134.561
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	50.730.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.251.900
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan pihak Propinsi NTB, Propinsi lain dan Kementerian	122.332.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.002.784
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			231.738.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.690.964
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang teregister serta terbayarnya honor untuk jasa non pegawai (K2 dan tenaga	110.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	113.300.000

		kontrak)				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lancarnya pelayanan operasional kantor	76.738.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		79.040.964
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbayarnya honor untuk jasa non pegawai	45.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		46.350.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			236.254.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% 243.341.620
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional (mobi dan motor) serta terbayarnya honor untuk jasa non pegawai	189.514.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		195.199.420
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbayarnya STNK dan Pajak Kendaraan Dinas (Mobil dan Motor)	20.240.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		20.847.200
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima, Semua Kecamatan,	Tersedianya jasa pemeliharaan	21.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		22.145.000

	Semua Kelurahan	dan perbaikan AC, PC, dan Laptop						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya gedung dan pagar kantor		5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.150.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Angka Kecelakaan Transportasi Darat	136	9.565.122.635	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dokumen rencana induk jaringan LLAJ	65%	9.852.076.314
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1.015.564.000	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	1.046.030.920
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan disiplin lalu lintas dan angkutan jalan, peran forum LLAJ dan rekayasa LLAJ serta terbayarnya honor untuk jasa non pegawai		1.015.564.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			1.046.030.920
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				7.521.700.635	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			7.747.351.654
Penyediaan Perlengkapan	Kota Bima, Semua Kelurahan	Panjang jalan yang telah		3.549.854.000	Penyediaan Perlengkapan	354985400 0		3.656.349.620

Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kecamatan, Semua Kelurahan	memiliki perlengkapan jalan		Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jalan yang telah terpelihara perlengkapannya	3.971.846.635	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	397184663 5	4.091.002.034
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			147.700.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100% 152.131.000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbayarnya honor untuk jasa non pegawai	147.700.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		152.131.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Pagar yang diperbaiki di Terminal Jatibaru		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			223.532.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100% 230.237.960

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2022 merupakan Rencana Kerja Tahun ketiga penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2018-2023. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Bima dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Perhubungan dituntut untuk siap dan sanggup membuat dan menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Tabel 2.5.

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2022 dari Para Pemangku Kepentingan Kota Bima

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Bima	Panjang jalan yang telah memiliki perlengkapan jalan	40 km	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Bima	Panjang jalan yang telah terpelihara perlengkapan jalannya	40 km	
2	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas				

Parkir			
Koordinasi dan	Kota Bima	Koordinasi dan	4 Titik
Sinkronisasi Pengawasan		Pengawasan Izin Parkir	47 Titik
Pelaksanaan Izin		Khusus	
Penyelenggaraan dan		Koordinasi dan	
Pembangunan Fasilitas		Pengawasan Izin Parkir	
Parkir Kewenangan		Tepi	
Kabupaten/Kota		Jalan Umum	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai amanat dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, memerlukan pijakan sebagai landasan untuk melaksanakan tugasnya, sehingga tergambar dalam Visi dan Misi sebagai berikut:

Dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur yang jelas, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik hasil yang akan dicapai selama waktu 5 (lima) tahun, maka telah ditetapkan tujuan Dinas Perhubungan Kota Bima.

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bima 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi	Baik

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam kaitannya dengan tujuan lima tahunan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dipenuhi dalam kurun waktu satu tahun atau lebih. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka telah ditetapkan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Bima sebagai berikut:

1. Berkurangnya pelanggaran lalu lintas di jalan
2. Meningkatnya fungsi layanan perpajakan dan layanan jasa terminal

Tabel 3.2.1.**Prioritas dan Sasaran**

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1		Meningkatnya kualitas pelayanan public	Rata-rata skor IKM	Berkurangnya pelanggaran lalu lintas di jalan	Persentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas
2		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Kontribusi PAD terhadap pendapatan	Meningkatnya fungsi layanan perparkiran dan layanan jasa terminal	Persentase peningkatan pelayanan jasa terminal Persentase peningkatan pelayanan perparkiran

Tabel 3.2.2**Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2022
	Tujuan:		
1	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi	Baik
	Sasaran:		
1	Berkurangnya pelanggaran lalu	Persentase penurunan angka	53%

	lintas di jalan	pelanggaran lalu lintas	
2	Meningkatnya fungsi layanan parkir dan layanan jasa terminal	Persentase peningkatan pelayanan jasa terminal	90%
		Persentase peningkatan pelayanan parkir	90%

Indikator Kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 serta dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2013-2018. IKU ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi organisasi, dan dirumuskan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.3.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks kebermanfaatan infrastruktur	Baik
2	Berkurangnya pelanggaran lalu lintas di jalan	Persentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas	53%
3	Meningkatnya fungsi layanan parkir dan layanan jasa terminal	Persentase peningkatan pelayanan jasa terminal	90%
		Persentase peningkatan pelayanan jasa parkir	90%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Bima selama satu tahun 2022) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bima dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bima.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bima dalam satu tahun kedepan.

- a. Adapun untuk uraian yang lebih detail mengenai rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran pada Dinas Perhubungan Kota Bima tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Sasaran dan Program/Kegiatan

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan
1	Berkurangnya Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2	Meningkatnya Fungsi Layanan Perparkiran dan Layanan Jasa Terminal	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin
		Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		

Tabel 4.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Alokasi Dana APBD		Keterangan			
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Perkiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	SKPD	Jenis Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				1/2/3	a/b	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Kota Bima	Cakupan Pelayanan Administra si Perkantora n	100%				Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	100%	4.297.673.851	4.426.604.067			
2	15	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.784.600	1.838.138			
2	15	01	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Bima, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan			Jumla h Doku men RKA/ DPA Satuan Kerja	2 Dokum en				286.800	295.404			

2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahun/RKA/DP A Satuan Kerja	2 Dokumen			249.000	256.470			
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen			249.000	256.470			
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan	3 Dokumen			999.800	1.029.794			

										an yang sesuai ketent uan										
2	15	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.193.517.801	3.289.323.335					
2	15	01	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Bima, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan			Jumla h Gaji dan Tunja nganA SN yang dibaya rkan padap erang kat daerah	1 Paket		3.025.218.001	3.115.974.541					
2	15	01	2.0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi			Kota Bima, Semua			Pelaks anaan	12 Bulan		164.978.000	169.927.340					

					Keuangan SKPD			Kecamatan, Semua Kelurahan			penata usaha an dan pengu jian/v erivik asi keuan gan SKPD bidan g sekert ariat									
2	15	01	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Bima, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan			Terse dianya Lapor an Keuan gan Akhir Tahun	1 Dokum en			199.800	205.794				
2	15	01	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S em esteran SKPD			Kota Bima, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan			Terse dianya Lapor an Keuan	4 Dokum en			2.873.000	2.959.190				

										gan Semester Realisasi Anggaran								
2	15	01	2.0 2	0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Terse dianya Laporan Progn osis Realis asi Angga ran	4 Dokum en			249.000	256.470			
2	15	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						400.000.000	412.000.000			
2	15	01	2.0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Realisasi Anggaran			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Terse dianya pakaia n	70 pasang			400.000.000	412.000.000			

										dinas yang layak									
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		234.378.650	241.410.010				
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terse dianya komponen kelistrikan per Kantoran	1 Paket		3.992.650	4.112.430				
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terse dianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket		3.794.500	3.908.335				

2	15	01	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksanaan rapat-rapat koordinasi antara bidang dan SKPD terkait serta pelayanan terhadap tamu	12 Bulan			53.528.700	55.134.561			
2	15	01	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan yang dicetak dan digan	4 Dokumen			50.730.000	52.251.900			

										dakan										
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksanaan ya koordinasi dan konsultasi dengan pihak Propinsi NTB, Propinsi lain dan Kementerian	60 Dokumen			122.332.800	126.002.784			
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	231.738.800	238.690.964			
2	115	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Kota Bima,			Jumla	300							

							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			h surat masuk dan surat keluar yang teregister serta terbayarnya honor untuk jasa non pegawai (K2 dan tenaga kontrak)	Lembar			110.000.000	113.300.000			
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Lancarnya pelayanan operasional	12 Bulan			76.738.800	79.040.964			

										ional (mobi dan motor) serta terbay arnya honor untuk jasa non pegaw ai									
2	15	01	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Bima, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan		Terba yarny a STNK dan Pajak Kenda raan Dinas (Mobi l dan Motor)	14 Kendar aan			20.240.000	20.847.200				
2	15	01	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan			Kota Bima,		Terse	1 Paket								

					dan Mesin Lainnya			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dianya jasa pemeliharaan dan perbaikan AC, PC, dan Laptop			21.500.000	22.145.000				
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharaan gedung dan pagar kantor	1 Paket		5.000.000	5.150.000				
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								Dokumen rencana induk jaringan LLAJ	65%	9.565.122.635	9.852.076.314			
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penetapan	100%	1.015.564.000	1.046.030.920			

												Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penin gkatan disiplin lalu lintas dan angkutan jalan, peran forum LLAJ dan rekayasa LLAJ serta terbay arnya honor untuk jasa non pegawai	12 Bulan			1.015.564.000	1.046.030.920			

										ai									
2	15	02	2.0 2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											7.521.700.635	7.747.351.654		
2	15	02	2.0 2	0 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			Kota Bima, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan			Panja ng jalan yang telah memil iki perlen gkapa n jalan	40 km				3.549.854.000	3.656.349.620		
2	15	02	2.0 2	0 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			Kota Bima, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan			Panja ng jalan yang telah terpe li hara perlen gkapa n jalann	40 km				3.971.846.635	4.091.002.034		

										ya									
2	15	02	2.0 3		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	147.700.000	152.131.000				
2	15	02	2.0 3	0 3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terbanyarna honor untuk jasa non pegawai	1 unit			147.700.000	152.131.000			
2	15	02	2.0 3	0 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas Pagar yang diperbaiki di Terminal Jatibaru	60 M2			-	-			

2	15	02	2.0 4		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	223.532.000	230.237.960			
2	15	02	2.0 4	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Koord inasi dan Penga wasan Izin Parkir Khusu s Koord inasi dan Penga wasan Izin Parkir Tepi Jalan Umu	4 Titik 47 Titik		223.532.000	230.237.960			

										m									
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	647.986.000	667.425.580				
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Kota Bima, Mpunda, Sambinae			Terse dianya SDM yang handal untuk pengujian berkala kendaraan bermotor	2 Orang		30.000.000	30.900.000				
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Kota Bima, Mpunda, Sambinae			Jumlah Kendaraan yang	3000 Unit		62.000.000	63.860.000				

										Lulus dalam Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Kota Bima, Mpunda, Sambinae		Pengetahui Pemilik Kendaraan Mengenal Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan	100 Orang			15.000.000	15.450.000			

										Bermotor									
2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji			Kota Bima, Mpunda, Sambinae			Terbayar honor untuk jasa non pegawai	12 Bulan			99.000.000	101.970.000			
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Kota Bima, Mpunda, Sambinae			Penindakan disiplin lalu lintas dan angkutan jalan	1 Kegiatan			441.986.000	455.245.580			
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan	100%	8.640.000	8.899.200			

										pegaw									
										ai									
JUMLAH														13.916.301.486	14.333.790.53 1				

BAB V

PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas Perhubungan Kota Bima tahun 2022 mendatang dapat mencapai hasil yang optimal dan efisien.

Harapan dari tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah semakin kuat dan profesionalnya aparatur Dinas Perhubungan dalam memberikan layanan perencanaan serta semakin tersedia dan lengkapnya dokumen pendukung sebagai referensi perencanaan sehingga output perencanaan yang dihasilkan oleh Dinas Perhubungan akan semakin integratif dan komprehensif.

Akhirnya kepada Tuhan jualah kita berserah diri seraya memohon bimbingan-Nya semoga apa yang direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat Kota Bima. Amin.

Kota Bima, Januari 2022
KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BIMA,

Drs. M. FARID, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640423 199003 1 011